

Penguasaan Tubuh Perempuan oleh Budaya Patriarki dalam Film Yuni

Tania Zahirah Salwa^{1*}, Sulih Indra Dewi², Asfira Rachmad Rinata^{3*}

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Indonesia

Abstract

Patriarchal culture tends to exclude women, can bring up various social problems that shackle women's freedom and curb the rights that women should have. This is what causes discrimination against women, especially against women's bodily autonomy. This social reality is often raised in a media, especially a film. One of the films with the theme of women living in patriarchal shackles is Yuni's film. The purpose of this study is to determine the mastery of women's bodies by the patriarchal culture contained in Yuni's film using the concept of critical discourse analysis by Norman Fairclough. According to Norman, the discourse in this film can be in form of text analysis, discursive practice, and socio-cultural practice. The type of research used is descriptive qualitative with approach Critical Discourse Analysis (CDA) in order to reveal more deeply the mastery of women's bodies by patriarchal culture in Yuni's film. The results of this study reveal that there are three forms of mastery over women's bodies by patriarchal culture in Yuni's film, namely (1) control over sexuality, (2) control over reproduction, and (3) control over movement space.

Keywords:

Mastery; women's bodies; patriarchal culture; critical discourse

Article History

Received 3 Juli 2023

Accepted 9 Juli 2023

*Corresponding Author:

taniazahirah@gmail.com

Pendahuluan

Budaya patriarki bukanlah hal yang asing dan masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia. Patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki di posisi sentral dan segala-galanya (Rokhmansyah, 2016). Budaya ini menganggap peran sosial laki-laki menjadi yang lebih tinggi dari kaum perempuan. Perempuan dianggap hanya sebagai pendamping kaum laki-laki yang biasanya dibebankan oleh pekerjaan-pekerjaan domestik serta cenderung mendapat campur tangan orang lain untuk mencapai tujuannya, hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang bebas dan kehilangan otonomi atas dirinya sendiri. Budaya patriarki yang cenderung mengesampingkan perempuan, dapat memunculkan berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan mengekang hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan (Rokhmansyah, 2016).

Adanya sistem patriarki yang masih dianut dalam struktur kehidupan sosial dapat menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender. Kuasa dominan dari pihak laki-laki yang disebabkan oleh budaya patriarki membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi (Rokhimah, 2014). Menurut data Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan di tahun 2019 masih berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96. Informasi tersebut menandakan bahwa masyarakat masih belum paham dan mengerti dengan baik mengenai peran

gender, sehingga masih ada ketimpangan yang dialami perempuan dari bidang ekonomi hingga kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Hal ini berbanding lurus dengan data catatan tahunan (CATAHU) 2022 Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa selama kurun waktu 2012-2021, tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender tertinggi, yaitu kekerasan terhadap perempuan sebanyak 338.496 kasus.

Berdasarkan kasus tersebut, mengartikan bahwa setiap individu memiliki otonomi atas tubuhnya masing-masing termasuk perempuan. Otonomi tubuh yang dimaksud ialah upaya sistematis dari setiap individu khususnya perempuan untuk mau dan mampu menjadikan tubuhnya sendiri otonom, utuh dari penjajahan siapa pun (Harper dalam Benedicta, 2012). Seorang perempuan yang dapat mengontrol tubuhnya sendiri dapat dikatakan bahwa perempuan tersebut memiliki otonomi atas tubuhnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benedicta (2011) bahwa seorang penari seksi perempuan dapat menempatkan diri sebagai subjek yang memiliki otonomi dan otoritas penuh atas tubuhnya. Artinya, penari seksi perempuan dengan tegas berani mengambil sikap terhadap perlakuan konsumen laki-laki yang tidak pantas. Akan tetapi, tidak terjadi pada perempuan yang berada di masyarakat patriarki. Dengan adanya sistem patriarki menjadikan perempuan cenderung terdeskriminasi dan tidak mempunyai kontrol atas tubuhnya.

Kemampuan laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai aspek tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitasnya dalam relasi atau interaksi dengan perempuan (Jauhariyah, 2016). Dalam stigma masyarakat patriarki, perempuan selalu diharapkan dapat menjadi pemangku norma yang disematkan dalam tubuhnya. Patriarki mendiskriminasi tubuh perempuan agar tunduk dan patuh pada norma yang ada, sehingga tubuh perempuan identic dengan tabu, dan pembicaraan apapun tentang seksualitas perempuan akan divonis sebagai amoral.

Pembicaraan mengenai seksualitas di kalangan perempuan yang tabu dapat menyebabkan adanya diskriminasi terhadap ekspresi seksual perempuan. Perempuan yang mengabaikan stigma-stigma tersebut akan mendapatkan sanksi sosial. Seolah-olah hanya perempuan yang dituntut untuk menjaga diri mereka (Marching, 2013). Perempuan selalu diatur berdasarkan pandangan laki-laki sehingga haknya berkurang dan terbatas. Batasan-batasan tersebut menjadikan perempuan perlu memperjuangkan eksistensi dirinya dan memperjuangkan hak-haknya.

Realitas sosial yang tertanam di kalangan masyarakat sering diangkat melalui berbagai media, khususnya media massa. Dalam media massa di Indonesia stereotip tentang perempuan melekat dalam berbagai tayangan dari sinetron, infotainment, telewicara, hingga berita. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Handoyo (2019) bahwa terdapat diskriminasi terhadap perempuan dalam industri media massa di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan status, wajah cantik, tubuh seksi, dan warna kulit yang dimiliki seorang perempuan. Apabila seorang perempuan memiliki wajah yang jelek dan hitam berarti perempuan tersebut tidak dapat masuk dalam industri media massa.

Salah satu media massa yang dapat dijadikan untuk mengangkat realitas sosial adalah film. Film selalu merekam realitas maupun ekspresi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian diproyeksikan ke layar lebar (Sobur, 2012). Film dianggap dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Fungsi film sendiri selain sebagai media hiburan dapat juga digunakan sebagai media yang informatif maupun edukatif bahkan persuasif.

Tidak jarang tubuh perempuan dijadikan objek dalam sebuah film. Tubuh perempuan dengan sengaja diperlihatkan dengan tujuan merangsang imajinasi penonton khususnya penonton laki-laki. Citra perempuan dalam sebuah film yang memang berfungsi sebagai tanda, tetapi suatu tanda yang mendapatkan maknanya bukan dari realitas kehidupan perempuan, tetapi dari hasrat dan fantasi laki-laki. (Jackson & Jones, 2009). Penggunaan tubuh perempuan sebagai komoditi di dunia hiburan menandakan masih adanya eksploitasi seksual terhadap perempuan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiono dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap perempuan terdapat dalam film Warkop DKI Reborn Jakarta Boss Part 1 yang ditunjukkan melalui eksploitasi visual dengan memperlihatkan sesuatu yang sensitif tentang perempuan dan narasi dalam film tersebut.

Film yang menampilkan sensualitas perempuan ialah film-film horor di era tahun awal 2000an, seperti *Suster Keramas* (2009), dimana film horor tersebut telah keluar dari konteks yang seharusnya menampilkan ketakutan, kegelisahan, dan suasana mencekam menjadi komedi horor yang dibalut dengan seks, serta didukung dengan dibintangi oleh artis porno asal Jepang. Namun ada juga upaya lain yang dilakukan melalui media dalam mengubah pandangan mengenai objektivitas tubuh perempuan untuk mendukung kesetaraan gender ialah melalui film bertemakan perempuan. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa film yang mengangkat isu mengenai kesetaraan gender, seperti *Perempuan Berkalung Sorban* (2009), *Kartini* (2017), *Ave Maryam* (2019), dan masih banyak lagi. Contoh film tersebut merepresentasikan masih tertanamnya budaya patriarki yang mengekang perempuan untuk memiliki hak atas tubuhnya.

Dari sekian banyak Film Indonesia bertema perempuan yang telah diproduksi, salah satu yang menarik untuk diteliti ialah Film *Yuni* yang rilis di tahun 2021. Menurut Himami, film karya Kamila Andini ini telah memenangkan penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021. Film ini membahas mengenai isu perempuan yang berfokus pada seksualitas serta penjajahan atas otonomi tubuh perempuan. Penggambaran seksualitas dalam film ini ditampilkan secara gamblang. Terdapat adegan-adegan yang dianggap tabu semakin ditonjolkan dengan maksud mengkampanyekan kebebasan perempuan atas tubuhnya. Adegan tersebut dapat dilihat pada salah satu scene dimana Yuni secara jelas melakukan hubungan badan dengan rekannya, selain itu juga ditampilkan rekan Yuni yang memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis, dan sebagainya.

Tak hanya mendapat penghargaan dan antusias dari masyarakat, film ini juga mendapat respon kontra dari beberapa pihak. Dilansir dari (indozone.id, 2021), film *Yuni* dianggap terlalu kontroversi karena melawan dogma agama. Film *Yuni* ditampilkan untuk menempatkan perempuan sebagai subjek budaya dan agama. Hal tersebut digunakan untuk mengangkat eksistensi perempuan tentang otonomi atas tubuhnya.

Pada tahun 2022 terdapat penelitian yang menjadikan film *Yuni* sebagai objek penelitian. Dalam penelitian Giswandhanim (2022) tersebut, membahas bagaimana film *Yuni* menggambarkan stereotype mengenai perempuan. Namun penelitian tersebut tidak meneliti secara detail, oleh karena itu penelitian saat ini ditulis untuk lebih memfokuskan adanya penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki di dalam film *Yuni*. Saat ini kita masih terjerat dalam budaya dimana hak-hak perempuan berkurang, pergerakannya terbatas karena adanya konstruksi dan aturan untuk perempuan oleh pandangan laki-laki.

Menurut Muhammad (dalam Rokhmansyah, 2016), otonomi tubuh perempuan merupakan hak setiap perempuan untuk memilih, mengendalikan, serta mengarahkan tubuhnya sesuai apa yang dikehendaki tanpa ada kekangan maupun aturan dari orang lain. Adanya ketimpangan

mengenai otonomi tubuh perempuan bisa mengakibatkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut memunculkan gerakan-gerakan perempuan untuk memperjuangkan dan mengangkat nilai-nilai kesetaraannya serta memberikan hak keadilan untuk melawan penindasan. Film Yuni dibuat untuk menggambarkan penindasan terhadap perempuan terutama mengenai seksualitasnya juga memiliki pesan bagaimana seharusnya perempuan memperjuangkan otonomi atas tubuhnya.

Realitas sosial penindasan terhadap perempuan dalam film Yuni menggambarkan posisi perempuan cenderung dirugikan dan dianggap kurang beruntung dibanding laki-laki. Dengan adanya realitas sosial disebut, diperlukan adanya suatu gerakan yang mampu mengatasi permasalahan tentang penindasan perempuan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teori feminisme radikal sebagai gerakan untuk mengubah permasalahan tentang penindasan terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan (Bhasin & Khan dalam Hamid, 2022). Perubahan yang dilakukan oleh aliran feminisme meliputi di aspek sosial, budaya, politik, teori-teori, dan filosofi moral.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) atau analisis wacana kritis Norman Fairclough. Metode analisis wacana kritis adalah metode analisis yang melihat aspek kebahasaan sebagai faktor penting untuk melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan sosial masyarakat (Moeleong, 2010:22). Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara mencatat bagian film Yuni yang memperlihatkan adanya penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki. Selanjutnya, penulis mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literature, catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) data collection dengan mengumpulkan potongan scene dari film Yuni yang dimaknai sebagai penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki, (2) data reduction dengan melakukan transkrip potongan adegan yang telah dipilih melalui aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait, (3) data display dengan menginterpretasikan data secara deskriptif yang telah terkumpul dan menghubungkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti teori feminisme radikal dan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough, serta (4) concluding drawing berdasarkan hasil yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam film Yuni dapat dilihat adanya penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki yang ditunjukkan. Dalam penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki tidak hanya menggambarkan bagaimana posisi perempuan dalam lingkungan masyarakat patriarki, tetapi pesan yang disampaikan mengandung simbol dan citra yang dapat dimanfaatkan untuk mempertajam kesadaran penerima pesan. Kajian analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan untuk memaknai pesan yang ada pada film Yuni. Analisis wacana kritis tidak hanya menekankan pada struktur kebahasaan saja, melainkan juga tentang konteks di balik pembuatan film tersebut, sehingga berperan dalam lingkup lingkungan masyarakat. Terdapat tiga tataran dalam analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosio-kultural.

Terdapat delapan scene yang dianalisis di dalamnya. Kedelapan scene tersebut dimaknai sebagai bentuk penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki dalam film Yuni dapat digambarkan melalui tiga bentuk penguasaan tubuh perempuan secara garis besar yang terlihat pada scene film Yuni, yaitu (1) penguasaan atas seksualitas, (2) penguasaan atas reproduksi, dan (3) penguasaan atas ruang gerak.

Penguasaan Atas Seksualitas

Seksualitas tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual, melainkan juga dapat diekspresikan dengan cara lain misalnya kontak fisik. Menurut Virginia Henderson (dalam Masriyah, 2015), seorang pakar keperawatan, seksualitas merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan begitu, masing-masing individu memiliki hak untuk mengatur dan menentukan arah tubuhnya termasuk perempuan.



Gambar 1. Tes Keperawatan Bagi Siswi

Pada scene ini, ditampilkan ibu wakil bupati sedang memberikan penyuluhan untuk siswa-siswi di sekolah Yuni. Ibu Wakil Bupati menggunakan kerudung berwarna biru dengan atasan lengan panjang berwarna gelap. Selain itu, disebelah ibu wakil bupati berdiri seorang moderator laki-laki. Komunikasi yang dilakukan berupa verbal dari sambutan wakil bupati serta pernyataan Adam. Terdapat pula komunikasi non verbal yang ditunjukkan dari layar LCD. Teks tersebut merepresentasikan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah akan malu hingga membungkus bayinya, sedangkan laki-laki yang menghamili tidak dituliskan menanggung beban yang sama. Perempuan dijadikan objek untuk berita yang dianggap merupakan perilaku asusila. Dalam pemberitaan yang tertulis pada LCD, laki-laki tidak dituliskan, menggambarkan adanya deskriminasi terhadap perempuan.

Pada dialog yang disampaikan oleh wakil bupati dalam scene di atas, berarti akan dilakukan pengecekan apakah siswi pernah bersetubuh dengan laki-laki atau apakah selaput daranya sudah robek atau belum. Sedangkan menurut dr. Liana Herlinda, selaput dara yang robek bisa terjadi karena hal-hal di luar hubungan seks, seperti celaka fisik. (Masriyah, 2015). Keperawatan yang

semestinya merupakan privasi seseorang dan bukan merupakan patokan nilai maupun baik buruk seseorang justru harus dites dalam scene ini. Mitos keperawanan harus segera ditinggalkan, karena lebih banyak menciptakan stres pada pasangan yang terobsesi dan tidak realistis, sekaligus menghakimi bahwa perempuan yang tidak perawan sudah tentu tidak baik. (Munti dalam Sundari, 2016) Dalam scene tidak digambarkan bahwa laki-laki juga harus melakukan tes keperjakaan, yaitu apakah laki-laki pernah bersetubuh dengan perempuan atau tidak.

Scene pertama menunjukkan adanya penguasaan tubuh perempuan dalam hal seksualitasnya. Hal tersebut merepresentasikan bahwa seksualitas yang dilihat melalui keperjakaan seorang laki-laki bukan hal yang diatur atau dipermasalahkan seperti halnya keperawanan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Guyani (dalam Andari, 2021), identitas keperawanan perempuan selalu dipertanyakan dan dibahas dibanding menanyakan keperjakaan laki-laki. Perempuan diatur dan dianggap bernilai hanya dari keperawanannya, sedangkan laki-laki dalam dialog ini tidak digambarkan memiliki nilai yang hanya dilihat dari keperjakannya.

Tradisi dan kepercayaan tersebut juga dipraktikkan dalam masyarakat bahkan instansi dengan memunculkan adanya tes keperawanan bagi calon anggota polwan maupun TNI wanita hingga calon istri anggota TNI. Praktik tersebut diatur dalam Penerapan Peraturan Panglima TNI yang disahkan pada 4 Juli 2007 (Amalia, 2018) membahas mengenai tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit, serta syarat wajib tes kesehatan bagi calon istri prajurit yang mana dalam serangkaian tes kesehatan terdapat tes keperawanan, sedangkan tidak ada dikhususkan tes keperjakaan untuk calon anggota TNI.



Gambar 2. Lamaran Mang Dodi

Pada scene ini, ditampilkan bahwa tokoh Yuni sedang mendengarkan percakapan antara Nenek Yuni dan tamunya. Yuni mendengarkan percakapan tersebut di balik pintu kamarnya dengan teman Yuni pada scene sebelumnya. Tamu yang sedang ditemui Nenek Yuni adalah Mang Dodi dan istrinya. Mang Dodi mengutarakan niatnya kepada Nenek Yuni untuk melamar Yuni.

Selain pemberian tambahan mahar yang diutarakan oleh Mang Dodi, terdapat pernyataan Mang Dodi untuk membelikan perhiasan berupa kalung untuk Yuni. Pemberian kalung yang dimaksudkan tersebut dapat diartikan sebagai ungkapan untuk mengikat hubungan antara Yuni dan Mang Dodi melalui mahar yang diterima Nenek Yuni. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa

Mang Dodi memiliki perasaan yang belum serius dengan Yuni dengan dasar keperawanan yang dimiliki Yuni.

Selain itu, dalam scene ini tampak adanya penggunaan kata “insyaallah” yang dikatakan secara berulang-ulang. Dalam scene ini ditunjukkan adanya penggunaan kata “insyaallah” oleh Mang Dodi sebagai kata penekanan dari janji yang belum tentu kebenarannya. Artinya, sesuai yang diungkapkan dalam scene ini, kata “insyaallah” diutarakan dengan maksud belum tentu benar istri Mang Dodi menyetujui pernikahan kedua Mang Dodi dan belum tentu benar Mang Dodi akan memberikan mahar untuk Yuni setelah mengetahui Yuni masih perawan.

Tuntutan mengenai keperawanan yang harus dijaga oleh seorang perempuan lajang telah diturunkan melalui tradisi adat dan budaya. Keperawanan dilekatkan dengan nilai kesucian perempuan hingga menjadi standar moralitas seorang perempuan. (Munti, 2005). Hal tersebut ditunjukkan melalui scene (2) dalam Film Yuni, dimana Mang Dodi akan memberikan mahar pernikahan yang tinggi, apabila Yuni masih perawan. Hal ini menggambarkan bahwa keperawanan adalah hal yang harus dimiliki oleh perempuan hingga ia menikah.

Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia perempuan akan dihargai jika ia bisa menjaga selaput daranya tersebut sampai ia menikah. Perempuan yang masih utuh selaput daranya untuk suami dianggap sebagai perempuan baik. Hal inilah yang menjadikan perempuan selalu dituntut dan dikaitkan dengan kesucian. Tuntutan keperawanan ini disebabkan oleh dominasi dan subordinasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. (Abdullah, 2001). Adanya tuntutan tersebut menjadikan sebuah pola pikir bahwa keperawanan ialah bukan lagi otonomi tubuh yang merupakan hak seorang perempuan. Anggapan-anggapan mengenai keperawanan tersebut menjadikan perempuan tidak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Dimana hal yang seharusnya privasi dan tidak bisa dijadikan sebagai patokan baik buruk seseorang ditampilkan dalam film adalah hal yang sangat diatur.



Gambar 3. Pembicaraan Masturbasi di Kalangan Perempuan

Dalam wacana Tika yang juga takut suaminya marah jika ia jujur atas rasa sakitnya menandakan Tika adalah minoritas dalam hal seksualitas dan menjadi objek yang dikuasai suaminya. Pada scene yang menggambarkan kondisi Tika, teman Yuni terdapat konsep tubuh yang dijinakkan atas penguasaan. Dimana tubuh perempuan dilanggengkan dalam diam,

ketidakberdayaan, dan Tika menerima itu semua tanpa dapat mengontrol arah tubuhnya (Foucolt dalam Saragih, 2019).

Selain itu, terdapat perbincangan tentang masturbasi yang dialami perempuan. Namun, dalam scene tersebut Ade, teman Yuni tampak kaget dan heran mengapa perempuan dapat melakukan masturbasi. Keheranan tersebut menggambarkan bahwa mereka hidup dalam budaya yang tidak memantaskan perempuan dan tidak biasa melihat perempuan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini merepresentasikan bahwa perempuan tidak dapat mengekspresikan kebutuhan seksualnya.

Pembicaraan mengenai seksualitas sangat tabu di kalangan perempuan sehingga tidak dapat mengekspresikan seksualitasnya. Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh Lucy Litwack melalui laman (harpersbazaar.co.id, 2020) bahwa sebagian besar perempuan menganggap kebutuhan seksual hanya berfokus pada kepuasan laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan atau jujur mengenai apa yang dirasakan saat berhubungan badan. Perempuan yang dianggap sebagai sosok inferior pada budaya patriarki selalu diposisikan sebagai pihak yang pasif dan mengikuti apa kata laki-laki.

Wacana tentang pembicaraan tentang seksualitas di kalangan perempuan juga ditampilkan dalam ranah pembuatan film oleh Kamila Andini sebagai sutradara film. Kamila Andini membuat film Yuni dengan menampilkan wacana yang mengandung isu-isu penting tentang perempuan yang bahkan selama ini dianggap tabu. Dalam hal ini, Kamila Andini ingin perempuan mengekspresikan kepuasan seksualnya secara terbuka dan jujur. Dilansir dari (magdalene.com, 2022), Kamila Andini merasa bahwa selama ini perempuan-perempuan terbelenggu dengan aturan serta doktrin-doktrin yang muncul dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia sendiri masih melihat seksualitas sebagai hal yang cenderung negatif, atau bahkan masih menganggap pembicaraan mengenai seksualitas secara tabu hal ini membuat banyak hal positif mengenai pembicaraan seksualitas masih disembunyikan dan diingkari. Hal tersebut sejalan dengan yang dilansir dalam (economica.id, 2019) bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa seksualitas bukanlah budaya bangsa Indonesia yang menganut adat ketimuran. Artinya, masyarakat Indonesia menganggap bahwa seksualitas hanya berbicara penuh secara vulgar tentang berhubungan badan. Hal ini pula yang membuat banyak masyarakat masih tidak mengerti tentang pentingnya pemenuhan hak seksualnya masing-masing. Baik perempuan ataupun laki-laki seharusnya memiliki hak atas tubuhnya sendiri, mereka berhak atas otonomi tubuhnya.

Penguasaan Atas Reproduksi

Perempuan memiliki kebebasan terhadap tubuhnya. Salah satunya kebebasan atas reproduksi, yaitu hak personal yang menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa fungsi reproduksinya digunakan tanpa adanya kuasa dari pihak lain. Hak mengenai reproduksi ini termasuk dalam deklarasi hak asasi manusia (Handayani, 2019). Pengekangan dan pemberian aturan kepada perempuan mengenai reproduksinya merupakan salah satu akibat dari adanya budaya patriarki.



Gambar 4. Rumah Tangga Suci

Potongan dialog pada scene ini menunjukkan bahwa perempuan masih diatur untuk mau atau tidak serta bisa atau tidak untuk memiliki keturunan. Pernyataan suci menggambarkan bahwa perempuan yang tidak bisa hamil merupakan sebuah kesalahan atau aib yang akan membuat malu laki-laki. Dalam penguasaan reproduksi, perempuan diharuskan untuk dapat memiliki keturunan, seperti yang menimpa Suci. Laki-laki dalam budaya patriarki akan dinilai seseorang yang superior jika dapat memiliki keturunan. Sedangkan dalam dialog, suami Suci merasa malu karena dianggap tidak dapat menghamili Suci yang padahal kondisi tersebut disebabkan oleh usia Suci yang masih belum mampu menerima kehamilan yang dapat menimbulkan adanya kekerasan pada rumah tangga.

Wacana tentang penguasaan atas reproduksi perempuan dapat dilihat sebagai hak asasi manusia dalam hak-hak reproduksi yang mengacu pada sekelompok prinsip hukum dan etika. Dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat pada bagian ini karena budaya patriarki tadi yang menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan (Sakina, 2017:70). Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, istri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri (Kania:2015). Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat bahwa suami akan melakukan kekerasan apabila istri tidak menuruti keinginan suami. Hal tersebut sesuai dengan yang dilansir di (news.detik.com, 2015), di Situbondo, Jawa Timur terjadi KDRT karena istri menolak keinginan suami untuk berhubungan intim.

Penguasaan Atas Ruang Gerak

Aspek ketiga tentang penguasaan atas ruang gerak perempuan menunjukkan bahwa laki-laki menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memaksa perempuan melakukan keinginannya. Tidak hanya didalam perdebatan teoritis pemahaman belaka, konsep patriarki berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman seperti ini, perempuan otomatis menjadi inferior secara tidak langsung Sakina (2017:75). Masyarakat yang masih terpaku pada paham patriarkis akan mempercayai bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah dan berada dibawah laki-laki sehingga dalam lingkungan berkeluarga pun mereka harus mengikuti apa yang dikatakan sang suami.



Gambar 5. Lamaran Pertama Yuni

Dalam adegan ini, keputusan Yuni untuk memilih pasangan tidak diindahkan lawan bicaranya. Yuni diatur untuk memutuskan apakah ia akan menikah atau tidak. Bahkan, dalam pembicaraan tersebut, menyatakan bahwa perempuan tidak seharusnya menempuh sekolah tinggi. Perempuan dibatasi hanya dalam urusan dapur, sumur, kasur. Maksudnya, perempuan seharusnya hanya memikirkan urusan domestik, dan juga bagaimana ia memberikan kepuasan seks untuk suaminya. Dalam hal ini, gerak perempuan dibatasi karena perempuan tidak dapat menentukan jalan hidupnya atau cita-citanya.

Pada scene ini dimaknai sebagai wacana tentang adanya pandangan masyarakat patriarki terhadap tugas dan kewajiban perempuan. Artinya, perempuan hanya dipandang sebagai yang berhubungan dengan pada sector domestik, seperti dapur, sumur, kasur. Selain itu, pada scene ini dapat perempuan dimaknai sebagai pemuas laki-laki. Artinya, perempuan hanya memiliki kedudukan di atas ranjang. Dalam hal ini menunjukkan adanya hierarki yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa laki-laki lebih tinggi dan berkuasa, sedangkan perempuan lebih rendah dan dikuasai. Perempuan hanya dipandang sebagai 'kanca wingking' yang artinya hanya berhubungan dengan pada sector domestik, seperti dapur, sumur, kasur. Pendidikan adalah kemewahan yang tidak bisa dinikmati oleh perempuan Jawa yang masih hidup di lingkungan patriarki, seperti tokoh Yuni. Sakina (2017:75) menegaskan bahwa sejarah nasional pun menguak fakta dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan, kecuali perempuan tersebut berasal dari kelas priyayi atau bangsawan.

Dalam hal ini, masyarakat yang ditampilkan dalam scene tersebut secara tradisi menganut konsep sosial gender yang patriarkis. Implikasi secara umum adalah wanita menjadi sub-ordinat pria. Peran masing-masing anggota keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keluarga. Hierarki dilanjutkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin anggota keluarga, misalnya saudara laki-laki memiliki struktur sosial lebih tinggi dibanding saudara perempuan. Relasi yang terbangun seringkali menempatkan seolah-olah laki-laki memiliki kemampuan/kekuasaan/kekuatan lebih besar dibanding anggota keluarga perempuan. Banyak stereotip bahkan mitos yang sudah tertanam di masyarakat, misalnya tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ada di tangan ayah/suami, sementara tanggung jawab domestik merupakan tanggung jawab ibu/istri (Sakina, 2017:70).



Gambar 6. Paksaan Menikah Sarah

Pada scene ini, Sarah dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya karena ditemukan beberapa orang di hutan mangrove bersama pacarnya. Sarah yang tidak melakukan apa-apa dengan kekasihnya dituduh melakukan hal tidak senonoh dan dilaporkan kepada orang tuanya. Sarah dianggap perempuan tidak baik tanpa mendengarkan penjelasan Sarah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya stereotipe yang ditujukan pada perempuan. Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa Sarah yang masih belum ingin menikah tidak memiliki kuasa dan otoritas pada dirinya sendiri untuk menentukan pernikahannya.

Dalam buku *Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam* karangan E.Linda Yuliani (dalam Ali, 2018:5) dijelaskan bahwa budaya patriarki yang masih terjadi di masyarakat membuat posisi perempuan menjadi terpojok dalam kasus pernikahan dini. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahi adalah perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Maka, meskipun realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental untuk menikah, namun sayangnya fakta tersebut masih diabaikan.

Menurut data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015 (dalam Kartini dan Maulana, 2019:219), angka pernikahan dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3

juta orang di tahun 2030. Dari banyak kasus yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan, hampir 50% pernikahan dini dilakukan antara perempuan berusia dibawah 18 tahun dengan laki-laki berusia diatas 30 tahun dan terjadi dibawah tekanan atau paksaan. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain.



Gambar 7. Pendidikan Untuk Perempuan

Dalam adegan ini juga menampilkan teks secara verbal bahwa gerak perempuan sangat dibatasi. Terlihat bagaimana kepala sekolah berpendapat bahwa sebaiknya siswi perempuan tidak dijanjikan sekolah tinggi dan lebih baik dinikahkan setelah lulus sekolah. Dalam pernyataan tersebut, tidak disampaikan bahwa laki-laki akan dinikahkan setelah lulus sekolah. Perempuan ditampilkan tidak memiliki pilihan selain dinikahkan di usia belia. Sedangkan laki-laki tidak disebutkan bahwa ia harus mau menikah setelah lulus sekolah. Laki-laki digambarkan bahwa ia dapat memilih pilihan dan dapat memutuskan jalan hidupnya sendiri.

Wacana tentang sikap diskriminasi perempuan seringkali tidak disadari karena sudah dianggap sebagai budaya atau sesuatu yang lazim. Dengan demikian, kaum perempuan semakin jauh dari hak-hak dan kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan. Salah satunya dalam aspek pendidikan. Anggapan tersebut menimbulkan wacana di dalam masyarakat bahwa setelah lulus sekolah, laki-laki cenderung akan lebih mudah mendapat akses untuk melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, perempuan harus menerima akibat dari patriarki bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi karena pada akhirnya mereka hanya menjadi ibu rumah tangga.

Praktik Sosio-Kultural

Budaya dan pandangan masyarakat yang melekat sejak lama mengenai anak perempuan yang harus mengalah dibandingkan dengan laki-laki membuat ketidaksetaraan gender semakin tertanam kuat pada lingkungan masyarakat yang mengkotak-kotakan peran perempuan dan laki-laki. Para orang tua di pedesaan umumnya masih berpikiran bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi apalagi sampai kuliah karena menurut mereka meskipun pendidikan anak perempuan tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Valentina Sagala dalam Enny (2008), bahwa pada tahun 2006

Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu pada kelompok usia 16-18 tahun APS laki-laki sebesar 52,48% sedangkan perempuan 50,46%.



Gambar 8. Lamaran Ketiga Yuni

Penguasaan atas ruang gerak perempuan ditunjukkan melalui dua aspek, yaitu pertama, adanya mitos menolak lamaran untuk ketiga kalinya. Pada scene tersebut menunjukkan adanya pandangan budaya patriarki tentang larangan menolak lamaran untuk ketiga kalinya akan mendatangkan hal yang buruk untuk kehidupan perempuan ke depannya (Nurchahyo, 2016:26). Kedua, adanya laki-laki yang memanfaatkan perempuan untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa Pak Damar memanfaatkan Yuni untuk menutupi kekurangannya tersebut di depan keluarganya.

Pada scene tersebut menunjukkan adanya pandangan budaya patriarki tentang larangan menolak lamaran untuk ketiga kalinya. Dengan adanya pandangan tersebut menyebabkan Yuni terpaksa menerima lamaran Pak Damar karena ia merasa tertekan untuk menolak lamaran ketiganya. Masyarakat budaya patriarki menganggap bahwa dengan menolak lamaran seorang laki-laki akan mendatangkan hal yang buruk untuk kehidupan perempuan ke depannya (Nurchahyo, 2016:26). Dalam hal ini, masyarakat mempercayai bahwa kedudukan seorang laki-laki akan mempengaruhi kehidupan perempuan kelak. Sehingga, perempuan dituntut untuk tunduk atau mengikuti kemauan laki-laki demi kebajikannya.

Mitos menolak lamaran tersebut muncul karena mereka hidup di desa dimana sebuah pendidikan dan berfikir modern itu hanya sekedar impian saja. Orang tua hanya memaksa kehendak sang anak untuk menerima lamaran tersebut agar tidak terjadi sangkal atas mitos penolak lamaran pertama pada perempuan (Mutmainnah, 2018:7). Percaya atau tidak sang anak akan tetap menerima. Dan mau tidak mau juga harus menerima hal itu. Orang tua yang masih berfikir kuno tidak peduli pada pendidikan anaknya, karena wanita di desa walaupun menempuh pendidikan tinggi jika menikah akhirnya akan masuk dapur dan mengurus suami juga anaknya. Maka dari itu, para orang tua lebih memilihkan anaknya hanya sebatas pondok pesantren setelah itu akan dinikahkan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil analisis wacana kritis Norman Fairclough yaitu analisis teks, analisis wacana, dan analisis sosio-kultural dalam mengungkap bentuk penguasaan tubuh

perempuan oleh budaya patriarki dalam sembilan scene dalam film Yuni dapat disimpulkan terdapat tiga aspek penguasaan tubuh perempuan oleh budaya patriarki yang ditunjukkan dalam film Yuni, sebagai berikut. Pertama, penguasaan atas seksualitas yang menggambarkan bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan hak seksualnya. Kedua, penguasaan atas reproduksi yang menggambarkan adanya ketidakbebasan perempuan atas reproduksinya. Artinya, perempuan tidak berhak menentukan jumlah anak atau keturunan yang diinginkan. Ketiga, penguasaan atas ruang gerak yang menggambarkan adanya keterbatasan perempuan dalam melakukan ruang geraknya. Dalam hal ini, perempuan digambarkan hanya memiliki ruang hanya di bagian kosmetik saja.

Dengan demikian peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, diantaranya (1) bagi penonton film agar lebih terbuka dan menjadi bahan refleksi dengan adanya fenomena penguasaan tubuh perempuan di lingkungan patriarki yang ada di sekitar, (2) bagi pemroduksi film agar mempertimbangkan nilai-nilai yang akan disuguhkan kepada khalayak melalui film yang akan dibuat, dan (3) bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti penelitian ini kembali melalui sudut pandang lain.

Daftar Pustaka

- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 2 No. 1, hal. 1-28.
- Benedicta, G. D. (2011). Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh Masyarakat, *Jurnal Sosiologi*. Vol. 16 No. 2. Hal. 141-156.
- Bogdan dan Taylor. (2012). *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Wacana :PengantarTeks Media*. PT. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Dasuqi, G. (2015). Menolak Berhubungan Intim, Suami Aniaya Istri Hingga Pingsan (Online). <https://news.detik.com>, diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pintar
- Foucault, M. (2012). *Pengetahuan & Metode: Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta. Jalasutra.
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah*. Vol. 8 No. 1, hal. 26-47.
- Hamid, R. (2022). Pemaknaan Kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi atas gagasan kaum Feminisme dan Fundamentalisme). *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 4 No. 1, hal. 1157-1169.
- Hasan, A.F. (2022). Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad. *Rechtenstudent Journal*. Vol. 3 No. 1, hal. 1-22.
- Heldifany, R. (2019). Pendidikan Seks di Indonesia: Tabu atau Bermanfaat?. www.economica.id, diakses tanggal 10 Oktober 2022.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Mosse, J. C. (2018). *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Piliang, Y. A. (2011). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Bandung. Matahari.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Jurnal Muwazah*. Vol. 6 No. 1, hal. 132-142.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta. Garudhawaca.

- Sakina, A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Journal*. Vol. 7 No. 1, hal. 71-80.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. CV Alfabeta.
- Sulistiono, A. dan Sulih I. D. (2019). Representasi Perempuan Dalam Film *Warkop DKI Reborn Jangrik Boss Part 1* Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8 No. 4, hal. 385-397.
- Sylvia, W. (2014). *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta. Jalasutra.
- Tong, R. P. (2017). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta. Jalasutra.